

MITRA BESTARI

Abdul Hakim bin Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
Ahmad Tarmizi bin Talib (*Universiti Putra Malaysia*)
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Mubammadiyah Yogyakarta*)
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)
Mohammad Nuh (*Universitas Branyajaya, Malang*)
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

PEMIMPIN REDAKSI

Andy Dermawan

SEKRETARIS REDAKSI

Bayu Mitra A. Kusuma

DEWAN REDAKSI

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhah
Achmad Muhammad; Nurmahni

ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Foya Frasasti

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks Oleh:



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

PENGANTAR EDITOR

MENJAGA KONSISTENSI, MEMPERKUAT EKSISTENSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat diterbitkan pada waktunya. Sejak volume sebelumnya, Jurnal MD telah mengalami beberapa perubahan baik pada struktur tim editor, tampilan atau *layout*, serta kelengkapan lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas jurnal. Pada edisi ini, Jurnal MD kembali tersusun dari tujuh manuskrip hasil penelitian para penulis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi. Yang menggembirakan adalah, mulai edisi ini Jurnal MD telah melibatkan *reviewer* yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, bukan hanya dari dalam negeri. Ini merupakan sebuah langkah awal yang strategis dalam ikhtiar internasionalisasi Jurnal MD. Bergabungnya para *reviewer* tersebut juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat eksistensi Jurnal MD di tengah banyak munculnya jurnal-jurnal baru dengan kajian serupa bak cendawan di musim hujan yang saling berebut naskah berkualitas.

Selaras dengan edisi sebelumnya, sebagai jurnal ilmiah yang mengkaji tentang manajemen dakwah (integrasi-interkoneksi antara ilmu dakwah dan ilmu manajemen), maka konten dari Jurnal MD edisi ini akan dimulai dari kajian dakwah yang bersifat doktrinal terlebih dahulu baru kemudian mengalir pada kajian dakwah yang bersifat transformasi sosial. Hal ini agar nuansa dakwah tetap menjadi *core* yang harus ditonjolkan dalam studi manajemen di UIN Sunan Kalijaga. Dimulai dari manuskrip yang pertama, Abdullah Muslich Rizal Maulana dari Universitas Darussalam Gontor and Vrije Universiteit van Amsterdam memunculkan sebuah gagasan tentang urgensi dakwah lintas agama (*interfaith da'wah*). Menurutnya, redefinisi sifat-sifat wajib Nabi Muhammad menggunakan kerangka teori semantik akan mengantarkan kita pada sebuah interkomitmen kebenaran Islam sebagai

sebuah fondasi teologis guna memenuhi tantangan dakwah yang makin kompleks dalam konteks lintas agama. Hal tersebut menjadi penting agar dakwah tidak hanya berputar-putar secara monoton dan stagnan dalam lingkaran umat Islam sendiri tanpa bisa disampaikan kepada pihak yang lain dengan menarik. Kemudian, manuskrip kedua hasil pemikiran Hidayah Hariani dari Program Pascasarjana Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa masyarakat modern saat ini seringkali tidak memperhatikan hak-hak perempuan dalam dakwah. Padahal menurutnya mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan dakwah berarti membuang setidaknya setengah dari potensi masyarakat. Ini harus menjadi bahan evaluasi, inspirasi, dan motivasi bagi penafsir Al-Qur'an untuk merumuskan produk interpretasi yang memiliki perspektif tentang peran nyata perempuan dalam dakwah.

Manuskrip ketiga karya Muhammad Irham dari Program Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, mengemukakan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan diarahkan kepada sektor-sektor produktif. Namun demikian, wakaf tunai pada kenyataannya saat ini belum serius dikembangkan oleh berbagai *stakeholder* dan ini menjadi tantangan kita bersama. Berlanjut pada manuskrip keempat karya Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam merevitalisasi kualitas manajemen masjid di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian mereka, ditemukan fakta empirik bahwa peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tiga aspek yang komprehensif meliputi idarah, imarah, dan ri'ayah. Manuskrip kelima karya Cucu Nurjamilah dari Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak juga masih membahas seputar isu manajemen masjid. Namun manuskrip ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari manuskrip sebelumnya, yaitu analisa gender model Naila Kabeer. Manuskrip ini mengemukakan bahwa di Pontianak

ditemukan beberapa masjid yang secara pengelolaan telah responsif gender. Hal tersebut ditinjau dari struktur kepengurusan, program kegiatan, dan penyediaan sarana prasarana masjid yang telah memberikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan.

Beranjak pada manuskrip keenam yang ditulis oleh Tontowi Jauhari dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, manajemen konflik dan *trust* berpengaruh langsung secara positif terhadap efektivitas pengelolaan Ormas Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung. Selain itu juga ditemukan hasil bahwa kepemimpinan transformasional dan manajemen konflik berpengaruh langsung positif terhadap *trust*. Karena itu sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan transformasional, manajemen konflik, dan *trust* agar Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung berjalan lebih efektif. Adapun selanjutnya manuskrip ketujuh atau terakhir yang disusun oleh Leni Yuliana dan Aris Risdiana dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah berhati-hati dalam menerbitkan sertifikasi halal pada sebuah produk. Tahapan pengambilan keputusan yang harus dilalui meliputi delapan tahap yang ketat yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengkajian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini penting agar sertifikat halal yang diterbitkan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Kajian-kajian yang disajikan mulai dari manuskrip pertama sampai dengan ketujuh adalah sebuah ikhtiar dalam upaya menganalisa problematika manajemen dakwah kontemporer. Harapannya nanti akan muncul *indigenous* manajemen dakwah yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Pada penyajian tujuh manuskrip tersebut, redaksi sangat menyadari bahwa masih terdapat berbagai ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan jurnal ini ke depannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan hasil penelitian dari semua pihak

yang turut berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini, serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Juli 2018
Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
SEMANTIC REINTERPRETATION OF THE PROPHET MUHAMMAD'S OBLIGATORY PROPERTIES FOR DA'WAH ADVANCEMENT IN THE INTERRELIGIOUS CONTEXT <i>Abdullah Muslich Rizal Maulana</i>	1-22
TAFSIR TEMATIK KONTEKSTUAL ATAS HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN DAKWAH PADA MASYARAKAT MODERN <i>Hidayah Hariani</i>	23-38
WAKAF TUNAI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT: REVITALISASI FILANTROPI ISLAM YANG NYARIS TERLUPAKAN <i>Muhammad Irham</i>	39-54
PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM REVITALISASI MANAJEMEN MASJID DI WILAYAH BANYUWANGI <i>Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono</i>	55-68
ANALISIS GENDER TERHADAP MANAJEMEN DAKWAH MASJID: SEBUAH PENDEKATAN MODEL NAILA KABEER DI KOTA PONTIANAK <i>Cucu Nurjamilah</i>	69-84
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MANAJEMEN KONFLIK, DAN TRUST : PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MUHAMMADIYAH CABANG PRINGSEWU LAMPUNG <i>Tontowi Jauhari</i>	85-100

PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENGAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)
DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL

Leni Yuliana dan Aris Risdiana

101-122

PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM REVITALISASI MANAJEMEN MASJID DI WILAYAH BANYUWANGI

Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono

Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

E-mail: nikopahlevi@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah kondisi masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat shalat. Padahal fungsi ideal masjid lebih luas dari sekedar tempat shalat saja. Di sisi lain peran stakeholder dalam memperbaiki masjid belum dapat merubah kondisi masjid. Oleh karena itu, perlu diteliti dan dilihat lebih jauh bagaimana peran stakeholder dalam memperbaiki manajemen masjid. Maka dipilih rumusan masalah penelitian, bagaimanakah peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam memperbaiki manajemen masjid dan bagaimanakah hubungan diantara keduanya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam revitalisasi manajemen masjid di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Banyuwangi berperan pada revitalisasi manajemen masjid di wilayah Banyuwangi melalui tiga aspek yaitu idarah (organisasi masjid), imarah, dan ri'ayah.

Kata Kunci: *Kantor Kementerian Agama, Manajemen Masjid, Banyuwangi*

Abstract

The background of this research is the condition of the mosque which only functions as a place of prayer. Though the ideal function of the mosque is wider than just a place of prayer. On the other hand the role of stakeholders in improving mosques cannot change the condition of the mosque. Therefore, it needs to be investigated and further seen how the role of stakeholders in improving mosque management. Then the research problem formula was chosen, how is the role of the Office of the Ministry of Religion in Banyuwangi Regency in improving mosque management and how is the relationship between the two. The purpose of the study was to describe and analyze in

depth the role of the Office of the Ministry of Religion of Banyuwangi Regency in revitalizing mosque management in the Banyuwangi Regency area. The research method used in this paper is descriptive qualitative. The results showed that the Banyuwangi Ministry of Religion's Office had a role in revitalizing mosque management in the Banyuwangi region through three aspects, namely idarah (mosque organization), imarah, and ri'ayah.

Keywords: *Ministry of Religious Affairs, Mosque Management, Banyuwangi*

LATAR BELAKANG

Warga negara Indonesia telah dijamin dalam menjalankan agamanya. Hal ini telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi agar setiap warga negaranya dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Lebih dari itu pemerintah juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Termasuk dalam hal ini adalah mengatur bagaimana rumah ibadah.

Rumah ibadah diharapkan menjadi ruang yang nyaman bagi setiap pemeluknya untuk beribadah didalamnya; rumah ibadah juga diharapkan memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal. Begitu pula dengan masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid merupakan tempat ibadah yang paling banyak di Indonesia; terdapat kurang lebih 700.000 masjid tersebar dari Sabang sampai Merauke yang digunakan oleh 207.176.162 jiwa umat Islam atau 87,185% dari penduduk Indonesia.¹

Hal tersebut memberikan arti bahwa masjid harus dikelola secara maksimal agar umat dapat beribadah dengan sempurna. Jika umat tidak sempurna dalam beribadah, maka ideologi Pancasila tidak dapat teraplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila Pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berbicara

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah dan Distribusi Penduduk*, diakses melalui http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index_pada 23 Januari 2018.

lebih jauh tentang kebutuhan umat beragama terhadap rumah ibadah, maka rumah ibadah dapat dikatakan sebagai jantungnya umat beragama. Dalam Islam misalnya jika masjid sudah tidak dikelola dengan baik maka ia merupakan salah satu tanda rusaknya umat Islam. Sebagaimana hasil temuan dari Gazalba yang menyimpulkan bahwa, "Krisis masjid membawa pada krisis kehidupan umat Islam atau sebaliknya krisis kehidupan umat Islam membawa krisis masjid. Sebab yang satu berakibat pada yang lain dan sebaliknya".² Rumah ibadah juga merupakan lambang eksistensi dan pengakuan bagi komunitas umat beragama.

Sekarang pemenuhan pemeluk agama terhadap rumah ibadah harus visioner. Dalam konteks masjid misalnya, ia harus dapat menampilkan manajemen yang modern tetapi tetap sesuai dengan koridor aturan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan contoh Rasulullah. Pembangunan fisik masjid yang baik perlu diimbangi dengan penyediaan layanan yang lain, misalnya: penyediaan pusat informasi Islam yang dikelola didukung dengan jaringan internet, website, dan aplikasi-aplikasi *gadget*, penyediaan sarana pendidikan Al-Qur'an dengan *audio-visual* untuk anak-anak hingga dewasa, kegiatan kuliah ilmiah Islam dengan pembicara pakar-pakar dibidangnya, dan pelaporan dana umat dan program kerjanya yang akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat.

Disamping tuntutan untuk menjadikan masjid lebih baik ternyata kondisi kekinian masjid masih mengalami berbagai permasalahan. Sucipto menyampaikan, bahwa terdapat dua kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan masjid. Pertama, pengelolaan masjid secara konvensional. Artinya, gerak dan lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimensi vertikal (hubungan manusia dengan Allah) saja, sedang dimensi-dimensi horizontal kemasyarakatan dijauhkan dari masjid. Kedua, pengelolaan masjid yang melewati batasan syariat Islam. Artinya, melakukan penyelenggaraan masjid pada ranah fungsi sosial namun kebablasan; dengan menyelenggarakan berbagai acara yang menyimpang di masjid.³ Masalah lain adalah masih banyak pengurus masjid melakukan pengelolaan secara tradisional, tanpa

² Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hlm. 338.

³ Hery Sucipto, *Memakmurkan Masjid Bersama JK*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), hlm. 66.

adanya perencanaan yang jelas, tanpa pembagian tugas, tanpa laporan pertanggungjawaban keuangan.⁴

Melihat hajat warga negara terhadap rumah ibadah (masjid) yang demikian besar ditambah dengan manajemen masjid masih menemui berbagai hambatan, maka sangat mendesak bagi semua umat Islam dan seluruh *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan masjid. Sehingga dicapai suatu kehidupan beragama yang lebih berkualitas yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Dari sisi pemerintah, maka peran Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan di bidang kemasjidan menjadi penting. Baik dalam menyediakan regulasi, menegakkan regulasi, maupun secara langsung mengelola dan menyediakan rumah ibadah yang baik. Lebih detail, Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi, Kantor di tingkat kabupaten/kota, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) di level kecamatan mempunyai tugas didalamnya.

Di antara peran Kemenag untuk memperbaiki manajemen masjid adalah pendataan masjid; dan sejak 2013 telah menggunakan sistem informasi berbasis *web* atau disebut program. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam perbaikan manajemen masjid belum dapat dirasakan secara utuh. Adanya pembangunan atau renovasi masjid yang selama bertahun-tahun tidak terselesaikan, sengketa pengelolaan masjid, manajemen masjid yang tradisional dan buruk, dan belum adanya pola pembinaan yang rutin, menyeluruh dan terukur untuk para pengurus masjid. Hal tersebut adalah potret masalah yang dihadapi oleh masjid.

Beranjak dari hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian atas peran yang dilakukan Kemenag memperbaiki manajemen masjid. Dan sebagai lokasi penelitian dipilihlah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan sekaligus potensial bagi perkembangan upaya perbaikan manajemen masjid. Dikatakan potensial dikarenakan

⁴ Moh. E Ayub et al., *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 33-34.

Kabupaten Banyuwangi yang terkenal dengan daerah tapal kuda di Jawa Timur merupakan basis kuat perkembangan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Adanya berbagai pondok pesantren dan sekolah berbasis pendidikan Islam menjadikan masyarakat Banyuwangi mempunyai kultur Islam yang baik sehingga dapat mendukung perbaikan manajemen masjid. Selain itu, peneliti berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian peneliti memahami fenomena yang akan diteliti. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah pertimbangan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya karena peneliti dapat menjangkau lokasi dan situs penelitian dengan lebih mudah.

GAMBARAN UMUM MASJID DI INDONESIA DAN BANYUWANGI

Peranan masjid pada umumnya terdiri dari ada empat poin yakni ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan ekonomi umat. Pada umumnya masjid di Indonesia baru menjalankan fungsi pertama saja.⁵ Sekarang, jumlah masjid di Indonesia sekitar 800.000.⁶ Fakta pembangunan masjid juga semakin banyak. Di Pulau Jawa kita hampir pasti akan menemukan satu masjid setiap RW ditambah lagi setiap RT-nya pun juga sudah mempunyai mushalla; pun kita juga akan menemui masjid atau mushalla yang terdapat di kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah serta sekolah. Selain jumlah masjid yang semakin banyak, sekarang ini juga bermunculan masjid dengan menampakkan gaya dan bentuk arsitektur yang beraneka ragam. Terutama di kota-kota besar semakin banyak masjid berdiri dengan kemewahan dan keindahannya. Dan hampir di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan masjid.

Namun, kita sering menemukan fenomena dimana masjid belum bisa memaksimalkan fungsinya dan memanajemen dirinya sebagai pusat ibadah dan peradaban umat Islam. Kondisi masjid yang sepi dari aktivitas selain shalat lima waktu. Menurut Ridwan dalam Sucipto

⁵ Ari Saputra dan Bayu Mitra A. Kusuma, “Revitalisasi Masjid dalam Dialektika Pelayanan Umat dan Kawasan Perekonomian Rakyat”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 1 No. 1* (2017), hlm. 14.

⁶ Jumpa Pers HM. Jusuf Kalla (Ketua Dewan Masjid Indonesia), diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/04/raja-salman-terkejut-dengar-masjid-di-indonesia-800-ribu> pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 19.35 WIB.

kondisi semacam ini dialami hampir seluruh masjid di Indonesia⁷. Sebagai gambaran, menurut hasil riset yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia 89,9% masjid di Indonesia sepi dari kegiatan keagamaan. Kondisi tersebut, salah satunya ditandai dengan suasana shalat maghrib yang semakin sepi. Temuan serupa juga terjadi di masjid-masjid yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Hanya 50% masjid di provinsi itu yang digunakan untuk shalat berjamaah lima waktu.⁸ Jika dalam pemfungsian dan manajemen masjid sebagai tempat shalat wajib saja sudah tidak maksimal, apalagi pemfungsian dan manajemen masjid dalam hal yang lain? Tentu saja akan lebih tidak maksimal. Tidak jarang pula kita dapatkan pintu-pintu masjid dikunci se usai melaksanakan shalat lima waktu dan setelah itu tidak ada kegiatan apapun. Kondisi lain dari masjid adalah masjid telah mempunyai pengurus masjid (takmir). Hal ini menandakan bahwa masjid telah menjadi wadah bagi masyarakat dalam bergotong-royong. Namun, kondisi pengurus masjid pun berbeda-beda, terdapat masjid yang telah memiliki pengurus yang lengkap dan profesional pun ada masjid yang memiliki pengurus dengan manajemen masjid yang masih tradisional.

Kondisi masjid di Kabupaten Banyuwangi tidak jauh berbeda dengan kondisi masjid di Indonesia secara umum. Menurut data, jumlah masjid di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 adalah 1.607 buah sedangkan mushalla sebanyak 4.727 buah dengan potensi jama'ah masjid 96,7% atau 1.629.479 umat Islam.⁹ Jika dirata-rata maka satu masjid/mushalla akan menampung jama'ah sebanyak 257 orang.

Hal penting selanjutnya adalah potensi masjid. Potensi penting dari masjid adalah wadah bagi berkaryanya masyarakat tidak hanya dalam ranah kegiatan ritual keagamaan, namun dapat berkembang ke ranah sosial, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika secara keorganisasian masjid diperbaiki dan aspek manajemen dimantapkan. Sehingga segala sumber daya potensial masjid dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

⁷ Hery Sucipto, *Memakmurkan Masjid Bersama JK...* hlm. 65.

⁸ Bersama Dakwah, *Hasil Riset: 89,9 Persen Masjid Sepi*, diakses melalui <http://www.bersamadakwah.com/2011/11/hasil-ri-set-899-persen-masjid-sepi.html> pada tanggal 30 Maret 2018.

⁹ BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2017*, diakses melalui banyuwangikab.bps.go.id pada tanggal 10 Januari 2018.

Sumber daya pendanaan dapat digali dari para jama'ah dan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Banyuwangi. Sumber daya manusia untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga sudah tersedia dari para jama'ah, sumber daya remaja dan pemuda juga sudah tersedia dari para jama'ah, dan sumber daya fisik berupa bangunan dan fasilitas masjid sebagai pusat kegiatan juga sudah ada.

Selanjutnya, terkait dengan permasalahan masjid yang ada di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa yang perlu dicatat. Pertama, kondisi masyarakat yang datang untuk shalat jama'ah pada hari-hari biasa masih relatif sepi. Indikator paling mudah diamati adalah perbandingan jama'ah yang datang shalat pada bulan Ramadhan terutama saat shalat isya dan tarawih tiba dengan hari-hari biasa. Pada saat musim shalat tarawih datang, banyak masyarakat yang datang untuk shalat bahkan hampir-hampir semua masjid penuh dengan para jama'ah sedangkan pada hari biasa jumlah shaf shalat rata-rata hanya dua shaf. Ini menjadi indikator yang paling mudah untuk mengukur sepi atau ramainya masjid. Jadi, suatu masjid dapat dikatakan sehat jika jumlah jama'ahnya pada bulan ramadhan tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasa.

Kedua, dari segi aktivitas mayoritas masjid masih sedikit aktivitasnya selain shalat lima waktu. Walaupun beberapa masjid di Kabupaten Banyuwangi telah ada yang mengadakan kajian rutin harian dan pekanan. Aktivitas penggalangan infaq juga masih belum optimal hanya dilakukan pada hari jum'at yang penyalurannya hanya digunakan sebatas pemenuhan untuk pembiayaan rutin masjid (pembayaran listrik dan pembayaran air). Penyaluran sosial kepada anak-anak yatim, anak-anak putus sekolah, dan orang-orang miskin masih terbatas. Potensi penggalangan dana dari umat Islam belum dapat ditangani secara profesional oleh masjid-masjid yang ada. Jika potensi ini dilakukan, maka tidak hanya anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang akan terbantu tetapi juga dapat membantu roda perekonomian masyarakat, dengan cara dana infaq disalurkan untuk membantu modal usaha bagi para pengangguran. Selain itu, masjid juga dapat mendirikan unit usaha yang produktif untuk membiayai operasional masjid sendiri.

Ketiga, kondisi pengurus masjid yang belum profesional. Kondisi manajemen masjid yang tradisional, tanpa pembagian tugas, tanpa laporan

akuntabilitas, baik keuangan maupun kegiatan. Dengan manajemen yang profesional masjid akan mengalami perkembangan yang cepat. Beberapa masjid yang telah profesional misalnya, mereka mempunyai karyawan yang dipekerjakan untuk mengelola masjid dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pengelolaan aktivitas, dana, pemeliharaan fisik, dan yang terpenting adalah pengembangan dakwah agar jama'ah masjid secara signifikan dapat bertambah kuantitas dan kualitasnya. Dengan pengelolaan yang seperti itu masyarakat akan datang sendiri untuk memberikan zakat dan infaqnya karena adanya jaminan kebermanfaatan dan akuntabilitas yang jelas tentang penggunaan dana.

Keempat, kondisi masjid yang terjebak pada fanatisme sempit yang mengatasnamakan perbedaan madzab. Penyebutan masjid NU, Muhammadiyah atau yang lain belum bisa cair. Atas nuansa perbedaan ini, menyebabkan kegiatan masjid menjadi terbatas pada umat tertentu saja dan tidak bisa mempersatukan umat Islam secara keseluruhan. Fungsi masjid sebagai tempat mempersatukan umat telah tereduksi karena kondisi ini. Selain permasalahan di atas sebenarnya juga terdapat perkembangan yang menggembirakan tentang kondisi masjid di Kabupaten Banyuwangi dimana semakin banyak masjid-masjid yang mulai mewarnai dirinya dengan berbagai aktivitas selain shalat lima waktu. Seperti di Masjid Agung dan masjid raya disetiap kecamatan yang banyak mengadakan kajian-kajian ke-Islaman dan pengembangan aktivitas lainnya. Perkembangan lain adalah pembangunan fisik masjid, sekarang telah banyak masjid di Kabupaten Banyuwangi yang telah direnovasi dan diadakan penambahan perlengkapan lainnya seperti, jam yang dilengkapi dengan jadwal shalat, kipas angin atau ac, dan karpet.

PERBAIKAN PADA ASPEK IDARAH

Manajemen masjid dalam aspek *idarab* sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid bahwa aspek *idarab* mencakup kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, tata usaha, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Peran untuk perbaikan pada aspek *idarab* oleh Kemenag Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan melakukan

Pembinaan tentang Fungsi dan Manajemen Masjid terhadap Pengurus Masjid. Pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid dilakukan setiap tahun oleh Kemenag. Secara teknis pelaksanaan pembinaan ini dilakukan dengan mengundang perwakilan-perwakilan pengurus masjid yang ada di Kabupaten Banyuwang. Namun, tidak semua perwakilan masjid di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 1.607 diminta hadir. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemenag. Jadi, dalam pelaksanaannya yang diundang hanya sekitar 60-an orang perwakilan pengurus masjid. Perwakilan tersebut diambil dari 24 kecamatan Kabupaten Banyuwangi, sehingga setiap kecamatan terdapat sekitar 2-3 perwakilan pengurus masjid yang tergantung pada kondisi masjid di setiap kecamatan.

Pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid yang disampaikan Kemenag kepada pengurus-pengurus masjid memiliki dua materi utama yaitu, “Manajemen Masjid” yang berisi penjelasan tentang tipologi-tipologi masjid dan manajemen masjid yang mencakup aspek *idarab*, *imarab*, dan *ri’ayah*. Selain itu juga disampaikan tentang fungsi ideal masjid yang berisi penjelasan tentang pemfungsian masjid pada masa Rasulullah yang beraneka ragam tidak hanya sebagai tempat shalat atau ibadah *mahdhab* saja tetapi mencakup juga ibadah *ghairu mahdhab*. Pemfungsian masjid yang seperti itu harus menjadi contoh bagi masjid-masjid pada masa sekarang dan mendatang. Materi kedua adalah tentang isu-isu penting keumatan; materi ini dapat berubah dan disesuaikan setiap tahun, tergantung kondisi kekinian umat Islam.

Hambatan dari pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid bahwa walaupun setiap tahun dilakukan pembinaan tetapi tidak semua masjid dapat diikuti dalam pembinaan, karena hanya sekitar 60-an perwakilan pengurus masjid yang dapat dibina dari total 1.607 masjid di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki Kemenag.

PERBAIKAN PADA ASPEK IMARAH

Manajemen masjid pada aspek *imarab* mencakup kegiatan ibadah *mahdhab* (ritual) meliputi shalat, dzikir dan sebagainya; serta kegiatan ibadah *ghairu mahdhab/ muamalah* (sosial kemasyarakatan). Peran untuk perbaikan

pada aspek *imarah* oleh Kemenag Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan melakukan Pembinaan tentang Fungsi dan Manajemen Masjid terhadap Pengurus Masjid. Pembinaan ini tidak hanya ditujukan untuk perbaikan pada aspek idarah saja tetapi juga imarah dan ri'ayah. Jadi, satu kegiatan ditujukan untuk tiga aspek perbaikan.

Dalam pembinaan tentang Fungsi dan Manajemen Masjid pengurus masjid yang selama ini telah melakukan aktivitas shalat dan dzikir didorong untuk mengembangkan kepada aktivitas yang lebih luas terutama menyangkut aktivitas sosial kemasyarakatan. Masjid didorong untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga masyarakat akan merasa dekat dengan masjid yang pada akhirnya masjid menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan tidak hanya pusat tempat ibadah *mahdhab*.

PERBAIKAN PADA ASPEK RI'AYAH

Peran Kemenag dalam memperbaiki manajemen Masjid pada aspek *ri'ayah* secara umum bertujuan untuk memperbaiki, memelihara sekaligus menambah bangunan fisik dan fasilitas masjid. Hal ini bertujuan agar masjid dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi semakin butuh dan tergantung dengan masjid. Pada akhirnya masjid dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat.¹⁰

Peran perbaikan pada aspek *ri'ayah* Kemenag Kabupaten Banyuwangi melakukan empat program. Pertama, Pembinaan tentang Fungsi dan Manajemen Masjid terhadap Pengurus Masjid. Pembinaan ini juga dapat digolongkan sebagai perbaikan manajemen masjid pada aspek *ri'ayah* (selain aspek *idarah* dan *imarah*) karena dalam pembinaan tersebut disampaikan pula manajemen masjid pada aspek *ri'ayah*. Penyampaian materi tersebut bertujuan untuk mendorong pengurus masjid untuk memperbaiki bangunan dan fasilitas fisik masjid.

Kedua, Pendataan Masjid dengan Sistem Informasi Masjid (SIMAS). SIMAS merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dan internet. Sistem informasi ini berisi data-data masjid dan mushalla se-Indonesia. Secara teknis program SIMAS dilakukan dengan petugas

¹⁰ Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam...*, hlm. 116

dari BIMAS mengakses SIMAS dengan browser dan menuju ke alamat <http://simbi.bimasislam.com/simas> setelah itu mengisi data masjid dan mushalla. Data-data yang dimasukkan mencakup profil lengkap masjid dan mushalla dan titik koordinat lokasi masjid dan mushalla yang bersangkutan. Data profil lengkap masjid dan mushalla tersebut didapat dari pengurus masjid dan mushalla yang mengajukan ke Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Setelah profil dimasukkan oleh petugas BIMAS nantinya pengurus masjid dan mushalla akan memiliki nomor ID masjid dan mushalla. Keberadaan SIMAS pada masa sekarang sangat penting karena tanpa data yang lengkap dan kekinian Kemenag dapat salah dalam mengambil kebijakan yang sifatnya strategis di bidang kemasjidan. Ini terutama dalam hal seleksi terhadap proposal permohonan bantuan pendanaan pembangunan yang masuk, dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan monitoring terhadap bantuan masjid atau mushalla.

Ketiga, Pemberian Rekomendasi Bantuan Dana Pembangunan/Rehab Masjid oleh Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Pemberian rekomendasi ini dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Banyuwangi saat terdapat pengurus masjid yang mengajukan proposal bantuan kepada Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kemenag Pusat. Kasus ini, terjadi ketika pengurus-pengurus masjid di Kabupaten Banyuwangi mempunyai jaringan atau *link* di Kemenag Provinsi atau Kemenag Pusat. Ketika proposal sudah diterima oleh Kemenag Provinsi atau Kemenag Pusat maka sebagai syarat penurunan dana bantuan dibutuhkan surat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Sehingga pengurus masjid meminta surat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Surat rekomondasi tersebut berfungsi sebagai validasi bahwa pengurus masjid memang benar-benar ada dan membutuhkan bantuan dana bagi pembangunan masjid.

Keempat, pemberian bantuan Al-Qur'an dan Juz Amma kepada Pengurus Masjid Al-Qur'an dan Juz Amma yang diberikan datang dari Kemenag RI. Jadi, Kemenag Kabupaten Banyuwangi lebih berperan sebagai distributor Al-Qur'an dan Juz Amma tersebut. Bantuan ini sebenarnya tidak hanya diberikan kepada pengurus masjid tetapi juga kepada mushalla dan jama'ah pengajian.

Secara teknis bantuan ini dilakukan dengan cara BIMAS memberikan pengumuman kepada pengurus masjid atau mushalla bahwa terdapat

Al-Qur'an dan/atau Juz Amma bantuan dari Kemenag Provinsi yang akan diberikan secara gratis kepada pengurus masjid dan mushalla dengan syarat mengajukan proposal permohonan bantuan Al-Qur'an. Selanjutnya, BIMAS akan menyalurkan dan memberikan Al-Qur'an dan Juz Amma kepada pengurus masjid dan mushalla yang mengajukan proposal permohonan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan. Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam memperbaiki manajemen masjid di Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tiga aspek, yaitu: *Pertama*, perbaikan pada aspek *idarab* (organisasi masjid) yang dilakukan dengan pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid terhadap pengurus masjid. *Kedua*, perbaikan pada aspek *imarab* (kemakmuran masjid) yang dilakukan dengan pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid terhadap pengurus Masjid. *Ketiga*, perbaikan pada aspek *ri'ayah* (bangunan dan fasilitas fisik masjid) yang dilakukan dengan pembinaan tentang fungsi dan manajemen masjid terhadap pengurus masjid, pendataan masjid dengan Sistem Informasi Masjid (SIMAS), pemberian rekomendasi bantuan dana pembangunan/rehab masjid oleh Kemenag Kabupaten Banyuwangi, dan pemberian bantuan Al-Qur'an dan Juz Amma kepada pengurus masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Saputra dan Bayu Mitra A. Kusuma, "Revitalisasi Masjid dalam Dialektika Pelayanan Umat dan Kawasan Perekonomian Rakyat", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 1 No. 1*, 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah dan Distribusi Penduduk*, diakses melalui <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index> pada 23 Januari 2018.
- Bersama Dakwah, *Hasil Riset: 89,9 Persen Masjid Sepi*, diakses melalui <http://www.bersamadakwah.com/2011/11/hasil-riset-899-persen-masjid-sepi.html> pada tanggal 30 Maret 2018.
- BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2017*, diakses melalui banyuwangikab.bps.go.id pada tanggal 10 Januari 2018.

- Hery Sucipto, *Memakmurkan Masjid Bersama JK*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- Jumpa Pers HM. Jusuf Kalla (Ketua Dewan Masjid Indonesia), diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/04/raja-salman-terkejut-dengar-masjid-di-indonesia-800-ribu> pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 19.35 WIB.
- Moh. E Ayub et al., *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1989.